

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
(Survai pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI



**Nama : Eka Putri Qusnul Khotimah
NIM : 222015035**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
(Survai pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Eka Putri Qusnul Khotimah
NIM : 222015035**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Survai Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
Nama : Eka Putri Qusnul Khotimah
NIM : 222015035
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Pembimbing I,

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 2019
Pembimbing II,

Dr.Hj. Yuhanis Ladewi, SE.,Ak. M.Si
NIDN/NBM : 022616901/765380

Darmavanti, SE, Ak, MM, CA
NIDN/NBM :0219057901/118172

Mengetahui
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, S.E.,M.Si.,AK.,CA
NIDN/NBM : 0216106902/994806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Putri Qusnul Khotimah

NIM : 222015035

Jurusan : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem
Pengendalian Intern pemerintah Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah (Survai Pada Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan)

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Eka Putri Qusnul Khotimah

ABSTRAK

Eka Putri Qusnul Khotimah/222015035/2019/Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Survai Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah survai pada organisasi perangkat daerah provinsi sumatera selatan dengan Tujuan penelitian yaitu untuk memenuhi besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah survai pada organisasi perangkat daerah provinsi sumatera selatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner. Metode analisis dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode analisis dan teknik analisis deskriptif dan asosiatif dengan bantuan program stastical program special science (SPSS).

Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah survai pada organisasi perangkat daerah provinsi sumatera selatan.

Kata Kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Survai pada Organisasi Parangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

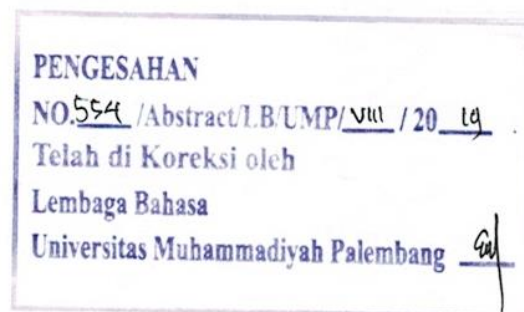
Abstract

Eka Putri Qusnul Khotimah / 222015035/2019 /The Influence of Human Resource Competency and Government Internal Control System on the Quality of the Survey Government Financial Report on Regional Apparatus Organization in South Sumatra.

This research was conducted to answer the existing problem: how much influence the competence of human resources and government internal control system on the quality of government financial reports surveyed in the organization of regional South Sumatra province with the research objective was to meet the magnitude of the influence of human resource competency and internal control system the government on the quality of the government's financial report survey on the regional apparatus organization of the province of South Sumatra. This study was associative research. The data used was primary and secondary data. The data collection technique was questionnaire. The analytical method and data analysis techniques used in this study were descriptive and associative analysis methods and analysis techniques by using the statistical program science special (SPSS)

The results of the analysis showed that human resource competence gave an influence on the quality of government financial report, the internal control system of the government gave an influence on the quality of government financial report. Human resource competence and government internal control system survey in the regional apparatus organization of South Sumatra Province.

Keywords: human resource competency, government internal control system, quality of government financial reports



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang motivator, junjungan umat islam, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. sehingga penyusunan Pengaruh Kompetensi sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Survai pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan). Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini berjalan dengan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta Bapakku Sugiyono dan Mamakku Yana yang telah mendidik, membiayai, mendo'akan dan memberikan motivasi, serta Adikku Nanda Yulia Pramitha, Rafa Rizky Fadillah dan seluruh keluarga besarku serta saudara seperjuangan yang dipertemukan karena Allah, yang selalu mendo'akan inspirasi dan dukungan agar menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pemimbingku Ibu Dr. Hj.

Yuhanis Ladewi, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Darmayanti, SE,Ak, MM, CA yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian menjadi lebih baik lagi. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Sa'adah Siddik, S.E.,Ak.,M.Si.,CA selaku Pembimbing Akademik
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kepala serta pegawai/staf di Organisasi Perangkat Daerah provinsi sumatera selatan yang telah memberikan izin penelitian atas keperluan skripsi penulis
7. Semua Teman-Teman Angkatan 2015
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, 2020

Penulis

Eka Putri Qusnul Khotimah

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DEPAN/CAVER.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiv
HALAMAN LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	14
C.Tujuan Penelitian	14
D.Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	
A.Landasan Teori	16
1. Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	16

a.Pengertian Kompetensi Sumber Daya manusia.....	16
b.Pengukuran Kompetensi Sumber Daya Manusia	18
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	20
a.Pengertian sistem pengendalian intern pemerintah	20
b.Pengukuran sistem pengendalian intern pemerintah	22
3. Kualitas laporan keuangan pemerintah	28
a.Pengertian kualitas laporan keuangan pemerintah	28
b.Pengukuran kualitas laporan keuangan pemerintah	31
C.Kerangka Pemikiran.....	37
D.Hipotesis	43
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A.Jenis Penelitian	44
B.Lokasi Penelitian.....	45
C.Operasionalisasi Variabel	45
D.Populasi Penelitian.....	46
E.Data Yang Diperlukan.....	48
F.Metode Pengumpulan Data	49
G.Pengujian data.....	50
H.Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.Hasil Penelitian	57
1.Tingkat Pengembalian Kuesioner	57
2.Profil Responden.....	58

3.Hasil Pengujian Data.....	61
B.Pembahasan Hasil Penelitian	83
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A.Simpulan.....	97
B.Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, sebagai kebutuhan akan akuntabilitas maka pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menyangkut tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberi informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik. Sebagai wujud pertanggungjawaban, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Hal ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah terdapat karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Terdapat empat karakteristik yang merupakan persyaratan normative agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu Relevan, memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat predikat, tepat waktu, lengkap, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. prinsip akuntansi dan pelaporan salah satunya terdapat prinsip penyajian wajar. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran berlebihan, neraca,

laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakaian eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggung jawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009 :160).

Kompetensi merupakan sebuah konsep yang dapat dimaknai sebagai terjadinya kombinasi antara keterampilan seseorang (*skills*), atribut personal (*personal's attribute*) dan pengetahuan (*knowledge*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi melalui alar ukur tertentu. Kompetensi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan kinerja, baik organisasi maupun perorangan (Nyoto, 2019:3). Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan seseorang atau individu didalam suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, kompetensi dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai suatu kinerja sehingga menghasilkan keluaran – keluaran (*output*) serta hasil-hasil (*outcomes*). (Emilda: 2014)

Kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugasnya dan pekerjaan ditempat kerja yang mengacu pada persyaratan kerja telah ditetapkan. (Edy, 2015: 203).

Kompetensi yang tepat merupakan faktor yang menentukan keunggulan prestasi dapat dimiliki organisasi apabila organisasi tersebut memiliki fondasi yang kuat, tercermin pada seluruh proses yang terjadi dalam organisasi yang artinya organisasi harus memiliki kompetensi inti (*corecompetency*) yang kuat sesuai dan sesuai dengan bisnis inti (*corebusiness*). Kompetensi inti merupakan komponen pembentuk misi dan budaya organisasi, (Muhamad, 2018:29)

Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset manfaat yang diharapkan seperti peningkatan kinerja yang merupakan bagian dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan, menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan menciptakan efisiensi dan efektivitas perusahaan (Yuhanis Ladewi, 2017: 39). Terdapat berbagai karakteristik dalam sistem pengendalian intern yang dapat mempengaruhi kualitas suatu sistem informasi akuntansi yaitu struktur organisasi yang memisahkan tugas dan tanggung jawab bagian secara tegas, pembagian tanggung jawab bagian dalam organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya,

praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan bagian setiap organisasi, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya (Yuhanis Ladewi, 2017: 41-42).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sepanjang semester I tahun 2017, Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) menemukan ada 1.137 ketidakpatuhan dalam pengelolaan finansial negara. BPK menyebut ada tiga sektor utama permasalahan yang berpengaruh kepada ketidakpatuhan penyusunan laporan keuangan terhadap undang-undang. Yang paling banyak adalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada 81 K/L yang mencapai angka 43 persen dari 884 kasus yang ada.

Kedua adalah kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan dengan detail pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat dilakukan oleh sebanyak 61 K/L (146 masalah), proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan di 53 K/L (166 masalah), sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai di 36 K/L (64 masalah), dan sistem akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM memadai di 5 K/L dan 5 masalah.

Ketiga kelemahan struktur pengendalian internal berupa *standard operating procedure* (SOP) belum disusun atau tidak lengkap pada 50 K/L (105 masalah), SOP belum berjalan optimal di 30 K/L (45 masalah), satuan pengawas internal (SPI) tidak optimal pada 14 K/L (19 masalah), dan tidak ada pemisahan fungsi pada 1 K/L dengan 1 masalah. (BPK, 2017)

Tabel I.1

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2018

Keterangan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		BUMN & Badan Lainnya		Total	
	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A. Kelemahan Permasalahan	998	-	6.662	-	319	-	7.539	-
B. Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	1.233	4.855.825,83	6.558	2.544.963,84	239	2.668.184,48	8.030	10.068.974,15
C. Temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan tidak efektif	87	267,2	-	-	117	1.490.520,41	204	1.490.787,67
Total (A+B+C)	2.318	4.856.093,04	12.78	2.544.963,84	675	4.158.704,89	15.773	11.559.761,77

Sumber: Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester I, 2018

Komisioner Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyebutkan setidaknya ada Enam kementerian Negara yang mendapat opini laporan keuangan disclaimer atau opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Hal ini dinilai karena kementerian atau lembaga pemerintahan tersebut tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Berdasarkan ringkasan laporan hasil pemeriksaan (LPH) BPK atas LKPP 2016, kementerian dan lembaga yang menerima status disclaimer ada enam, mereka

adalah Kementerian Lautan Dan Perikanan, Komisi Nasional, Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementeria Pemuda Olahraga, Lembaga Penyiaran Public TVRI, Badan Keamanan Laut, Serta Badan Ekonomi Kreatif (Agung Firman Sampurna, 2017)

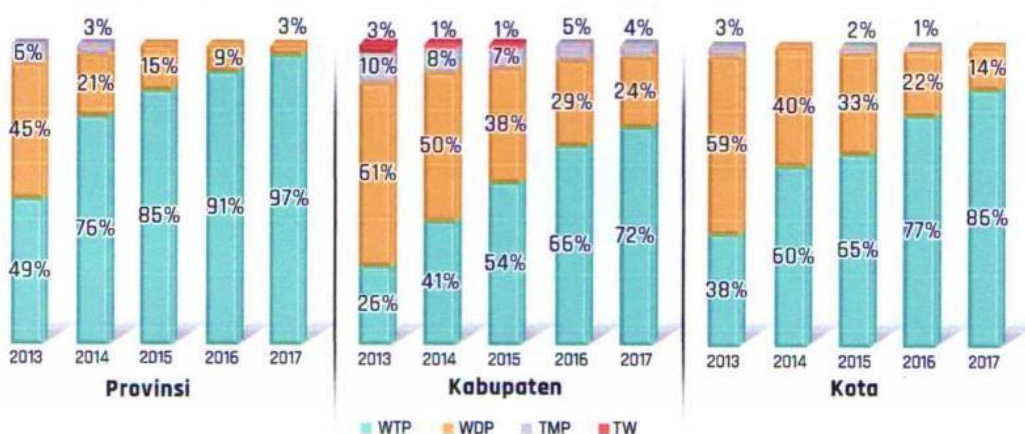
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyoroti lemahnya Sistem Pengendalian Intern Kementerian/ Lembaga dalam pengelolaan Keuangan. BPK menemukan 11 masalah terkait kelemahan Sistem Pengendalian dalam pemeriksaan Laporan Keuangan 15 entitas AKN I yang antara lain meliputi Kementerian Koordinator Politik Hukum Dan Keamanan, Lembaga Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, Dewan Ketahanan Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Komnas Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu, Badan Meteorology Klimatologi Dan Geofisika, Dan Badan SAR Nasional. Kesebelas temuan akibat kelemahan Sistem Pengendalian Intern diantaranya penerapan Basis AkruaI belum memadai, penetapan status asset tetapi belum tuntas, penatausahaan persediaan belum memadai pemanfaat barang milik Negara belum sesuai ketentuan, lemahnya pengelolaan kas, penatausahaan piutang paten kurang memadai, serta pencatatan dan pelaporan hibah tidak memadai (Agung Firman Sampurna, 2017).

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2015 ke pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pelaporannya tersebut, BPKI

menemukan enam permasalahan dalam pemeriksaan LKPP 2015. Ketua BKP mengatakan BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP), atau sama dengan opini LKPP 2014. Menurutnya enam permasalahan yang ditemukan BPK tersebut yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP. Permasalahan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan (Hary Azhar Azis, 2016)

Berdasarkan data dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK semester I (IHPS I) tahun 2018, dari hasil pengawasan atas kualitas laporan keuangan daerah tahun 2017 menunjukkan bahwa telah terjadinya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah daerah. Perkembangan opini LKPD selengkapnya selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar I.1

Gambar I.1
Opini LKPD Tahun 2013–2017
Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah



Ket: WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

TW : Tidak Wajar

WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

WDP: Wajar Dengan Pengecualian

TMP : Tidak Menyatakan Pandapat

Sumber: bpk.go.id,2018

Gambar I.1 tersebut terlihat kenaikan opini dari tahun 2016 terjadi pada seluruh tingkat pemda. Pada pemerintah provinsi, pencapaian opini WTP bertambah dari 31 LKPD (91%) menjadi 33 LKPD (97%). Begitu pula untuk pemerintah kabupaten yang bertambah dari 275 LKPD (66%) menjadi 298 (72%), dan pada pemerintah kota dari 72 LKPD (77%) menjadi 80 LKPD (86%). Dari 542 LKPD tahun 2017 yang diperiksa BPK, sebanyak 131 LKPD memperoleh opini WTP , yaitu 113 WDP dan 18 TMP.

Tabel I.2
Permasalahan Ketidapatuhan Terhadap Perundang-undangan dan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2016-2017

Permasalahan	Jumlah permasalahan	Nilai (Rp Miliar)	Pemerintah Daerah
Ketidapatuhan Terhadap Perundang-undangan			
Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume atas pekerjaan pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp4,40 miliar, dan pekerjaan pembangunan Jembatan Musi VI Kota Palembang senilai Rp4,12 miliar	2	8,52	Provinsi Sumatera Selatan.

Permasalahan	Jumlah Masalah	Nilai (Rp Miliar)	Pemerintah Daerah
Kekurangan volume atas paket pekerjaan fisik, antara lain pada pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan	-	5,07	Provinsi Sumatera Selatan
Denda keterlambatan senilai Rp7,51 miliar belum dikenakan, yaitu atas pekerjaan: 1) Pembangunan Gedung PAM OBVIT Polda Sumatera Selatan dan pembangunan Gedung Mapolres Kabupaten Empat Lawang senilai Rp929,90 juta. 2) Peningkatan dan pembangunan jalan modal pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang, serta pembangunan rumah sakit dan pembangunan interior RSUD pada Dinas Kesehatan senilai Rp6,58 miliar.	2	7,51	Pemprov Sumatera Selatan
Kelamahan SPI			
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain: 1) Penyimpanan barang pada OPD tidak didukung dengan kartu stok barang sehingga persediaan yang dilaporkan pada akhir tahun hanya sesuai dengan hasil <i>stock opname</i> sisa persediaan yang ada. 2) Rekonsiliasi nilai aset tetap antara bidang aset dan bidang akuntansi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) tidak dilakukan. 3) Penyertaan modal dengan kepemilikan 100% tidak didukung dengan laporan keuangan sejak tahun 2014-2017.	5	-	-

Sumber : Ikhtisal Hasil Pemeriksaan, 2019

Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) untuk keempat kalinya mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas kinerja pengelolaan keuangan 2017. Meskipun telah 4 kali meraih opini WTP, tetapi masih ada permasalahan diantaranya pengelolaan aset belum memadai, kekurangan volume belanja modal, laporan atas kepatuhan peraturan perundang-undangan. (Dr Agus Jiko Pramono, 2018)

Mengungkap bahwa penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut adalah wujud komitmen BPK untuk memenuhi amanat dari empat undang – undang yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang pembendaharaan Negara, dan UU no.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, serta UU no. 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksaan keuangan. Keempat Undang – Undang tersebut mengharuskan BPK untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaanya kepada lembaga perwakilan, dalam hal ini DPRD serta Gubernur/Bupati dan Walikota. Namun dalam pemeriksaan “masih terdapatnya temuan penatausahaan dan pengelolaan aset tetapi pemerintah daerah belum memadai sampai dengan penerapan akrual basis belum diselesaikan, kebijakan kepala daerah terkait akrual basis terlambat disusun atau disusun secara tepat (terkait kebijakan penyisihan piutang, penyusunan, persediaan, amortisasi, dll) pemahaman yang masih belum memadai atas penerapan akrual basis yang berdampak kesalahan atas dalam melakukan analisis transaksi dan mengakibatkan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, kesiapan SIMDA BPKP atau SIPKD atau sistem informasi akuntansi akrual belum sempurna (I Gede Kastawa, 2016)

Palembang juga tergolong masuk kategori yang bagus, karena meraih 4 kali WTP (wajar tanpa pengecualian) dan itu harus dipertahankan. Ucapnya dihadapan anggota DPRD, camat, lurah, dan kepala dinas di lingkungan pemerintah kota Palembang. Badan pemeriksaan keuangan lanjutnya, masih menemukan berbagai permasalahan seperti Pengelolaan Kas, Pengelolaan Piutang, Pengelolaan Asset Tetap, Pengelolaan Pendapatan, Dan Pengelolaan Belanja Pegawai. Ia juga menjelaskan bahwa masih menemukan asset tetap yang dicatat secara gabung dan tidak menemukan keberadaannya dan dikuasai pihak lain (Isma Yatun, 2018)

Rapat paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang menyatakan bahwa ketidaknyamanan wakil rakyat atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkuangan pemerintah kota Palembang yang dianggap tidak Maksimal. Bahkan komisi I mengatakan bahwa saat ini masih ada program OPD pemerintah kota Palembang yang belum berjalan. Karena masih banyak OPD yang tidak memahami berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah dianggarkan. Bahkan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan penyaluran dana desa dinilai masih kurang, penyaluran dana desa dilakukan sejak Februari lalu namun hingga 21 Mei 2018 ini realisasinya baru 85,65 persen yang sudah masuk ke kas desa untuk tahap pertama. Sementara sisanya masih berada direkening kas pemerintah daerah (Fauzi Achmad, 2017)

Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) mengungkapkan bahwa pengawasan dan pembinaan dana desa

dibawah pengawasan pemerintah daerah (Pemda) yang dalam hal ini camat dinilai belum efektif. Pemeriksaan yang dilakukan BPK ini meliputi dari pendidikan kemudian kesehatan dan berikutnya dana desa, dari kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa sepenuhnya belum efektif. Bisa disebabkan akibat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) beserta kompetensi yang kurang dan diikutiny saran prasarana (Maman Abdul Rachman, 2019)

Penelitian sebelumnya yang oleh Ahmad (2016) dengan Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten lamongan. Nilai signifikan 0,000 memiliki hubungan yang positif antar variabel dengan pengaruh presentase sebesar 95%, dimana pengaruh hubungan tersebut dinyatakan kuat antara variabel sistem pengendalian intern terhadap terhadap kualitas laporan keuangan, hanya 5% variabel lain yang mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan yang belum diteliti.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Putriasari (2017) dengan hasil penelitiannya bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah DIY, penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah DIY, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah DIY.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Freddie (2016) dengan hasil penelitiannya bahwa kompetensi sumber daya manusia, perangkat pendukung,

peran auditor internal secara bersama-sama berpengaruh koefisien determinasi 60.6% maka hal ini menandakan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia perangkat pendukung, peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah cukup erat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tuti (2014) dengan hasil penelitiannya bahwa Terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara simultan. Secara parsial, Terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, dan Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara parsial, Terdapat pengaruh tidak signifikan antara Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mengena kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan kualitas laporan keuangan merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (survai pada organisasi perangkat daerah provinsi sumatera selatan)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah.?
2. Seberapa besar Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui besar Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
2. Untuk mengetahui besar Pengaruh Sistem Pengendalian Intern pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

F. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan keuangan.

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi organisasi perangkat daerah akan pentingnya sumber daya manusia yang kompeten serta sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai sehingga akan mudah dalam melaksanakan tugasnya.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai referensi maupun sebagai bahan penelitian sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Firman Saputra. 2017. *BPK Soroti Lemahnya Sistem Pengendalian Intern Kementerian/Lembaga*. Antarnews, Jakarta.
<https://m.antarnews.com/berita/631918/bpk-soroti-lemahnya-sistem-pengendalian-intern-kementerianlembaga>
- Agung Firman Saputra. 2017. *BPK Beberkan Kualitas Sdm Dienam Kementerian Ini Tidak Kompeten Dan Tidak Mampu Bekerja*. Rmol. Jakarta
<https://rmol.com/amp/2017/05/31/293622/BPK-beberkan-kualitas-SDM-di-enam-kementerian-ini-tidak-kompeten-dan-tidak-mampubekerja>
- Agus Joko Pramono, 2018. *Pemprov Sumsel Raih WTP, BPK titip Tiga Perbaikan*. Rimaunews, Provinsi Sumatera Selatan
<http://www.rimaunews.com/berita/rimau-pemerintah/view/pemprov-sumsel-raih-opini-wtp-bpk-titipkan-perbaikan.html>
- Ahmad Faishol. 2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan)*. Volume I No.3, Oktober 2016
- Anwar Sunasi. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Keenam. Jakarta:Salemba Empat
- Badan Pengolahan Keuangan. 2017.*BPK Temukan 1.137 Ketidapatuhan dalam Laporan Keuangan Pemerintah*. Tribunnews, Jakarta
<http://m.tribunnews.com/nasional/2017/10/04/bpk-temukan-1137/ketidapatuhan-dalam-laporan-keuangan-pemerintah>
- BPK Republik Indonesia, 2018. *IHPS I 2018. BPK Ungkap 9.808 Temuan*. Rmol,
<https://rmol.com/amp/2018/10/23/363056/IHPS-I-2018,-BPK-ungkap-9.808.temuan->
- Burhannudin Yusuf. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dilembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Duwi Priyanto . 2016. *SPSS Hanbook*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Madiacom
- Dwi Prastowo. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Edi Sutrisno. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Edi Sutrisno. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana
- Emilda Ihsanti. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kab, Lima Puluh Kota)*

- Erlina dkk.2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Berbasis Akrua: Salemba Empat
- Fauzi Achmad Komisi, 2017. *Kinerja OPD pemerintah Kota Palembang dianggap tidak maksimal*. Beritamusi, Palembang
<http://beritamusi.co.id/2017/09/27/kinerja-opd-pemkot-palembang-dianggap-tidak-maksimal/>
- Freddie Lasmara, Sri Rahayu. 2016. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung, Dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Vol.3 No.5 April-Juni 2016*
- Herry Azhar Azis.2016. *BPK Ungkap 6 Masalah Laporan Keuangan Pemerintah*. Ekbis.sindows, Jakarta <https://ekbis.sindoews.com/read/1114372/33/bpk-ungkap-6-masalah-laporan-keuangan-pemerintah-2015-1465191938>
- Hery. 2014. *Analisis Kinerja Manajemen*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo
- I Gede Kastawa, 2016. *Kepala perwakilan menyerahkan LPH Triwula IV tahun 2016*. Palembang.bpk.go.id <http://Palembang.bpk.go.id/?p=13905>
- Imam Ghozali.(2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Isma Yatun. 2018. *BPK Temukan 5 Permasalahan Dipalembang*. Detiksumsel, Palembang <https://www.detiksumsel.com/bpk-temukan-5-permasalahan-dipalembang/amp/>
- Muhammad Busro. 2018. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UUI Press
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi sektor publik*. Yokyakarta: C.V ANDI
- Maman Abdurachman, 2018. *Kurang efektif, BPK minta camat awasi dana desa, apa kendalanya?* Wartaekonomi, Palembang
<https://www.wartaekonomi.co.id/read208680/kurang-efektif-bpk-minta-camat-awasi-dana-desa-apa-kendalanya.html>
- Mardi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Cetakan Ke.3. Bogor: PenerbitGhalia Indonesia
- Mulyadi. 2013. *Auditing (Edisis 6)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

- M. Yusuf John Dwi Setiawan S. (2013). *Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jl. Palmerah Barat.
- Nyato. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Uwais Inspirasi Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 71 tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Keuangan*
- Putriasri Pujanira Dan Abdullah Taman. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Jurnal Nominal/Volume VI Nomor 2/Tahun 2017*
- Sudarmanto. 2018. *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, & R& D*. Bandung: Alfabet
- Syaiful Bahri, 2018. *Metode Penelitian Bisnis Lengkap Dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. Penerbit Andi (Anggota IKAPI). Cetakan CV Andi Offset.
- Tuti Herawati. 2017. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)* Vol.XI No.1 Tahun 2017
- Uma Sekaran & Roger Bougie. 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi 6. Buku Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Undang – undang nomor 7 tahun 2013 *tentang pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil*
- Yuhanis Ladewi. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi (Teori Dan Praktek)*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang